

BAB V

KESIMPULAN

Jepang menjadi lumpuh akibat dari kekalahannya pada perang dunia ke dua. Namun, nampaknya karena kondisi politik internasional yang berkembang saat itu, menjadikan pemerintah pendudukan Amerika Serikat mengendalikan Jepang dengan saksama dan mencetaknya menjadi sekutunya sepanjang masa. Walaupun demiliterisasi secara nyata dilaksanakan, namun Amerika Serikat melindungi Jepang dengan perlindungan yang menenteramkan dan membuat Jepang leluasa bergerak pada bidang-bidang lain.

Kenyataan ini, nampaknya membuat Jepang bergerak secara realistic dengan menyadari bahwa eksistensinya hanya bertumpu pada kekuatan ekonomi. Dengan semangat membangun kekuatan ekonomi dan perdamaian Jepang ingin memperoleh apa yang telah hilang, 'eksistensi nasional'. Kesadaran dan semangat ini demikian besar sampai pada kedudukan ekstrim yang seakan-akan menjadi semacam 'ideologi nasional'. Kenyataan lain, yang merupakan kenyataan alami adalah kondisi alam Jepang yang miskin akan sumber-sumber alam yang merupakan bahan baku bagi industrinya. Industrialisasi pada gilirannya memerlukan pemasaran hasil industry yang juga tidak dimiliki oleh Jepang. Dengan demikian, eksistensi Jepang sangat tergantung oleh kondisi internasional yang memungkinkan perdagangan bebas. Perdagangan bebas memungkinkan bagi Jepang untuk memasarkan hasil industrinya sekaligus memperoleh bahan mentah sebagai bahan baku industrinya. Hubungan internasional yang bebas dan damai, mutlak bagi Jepang.

Sejak tahun 1945, hubungan Jepang dengan dunia internasional praktis terhenti sampai setidaknya-tidaknya awal tahun 1950-an. Setelah ditandatanganinya perjanjian San Francisco dan perjanjian pertahanan bilateral dengan Amerika Serikat pada bulan September 1951, Jepang memperoleh kemerdekaannya kembali pada tanggal 18 April 1952 yang sekaligus member jalan ke luar untuk menjalin hubungannya kembali dengan

dunia internasional, terutama tetangga-tetangga dekatnya. Mulai saat itu Jepang berusaha kembali menjalin hubungan dunia internasional dengan mengadakan perjanjian-perjanjian bilateral sekaligus menjalin hubungan diplomatic yang memungkinkan hubungan-hubungan yang lebih luas di berbagai bidang.

Sejak mulai usaha modernisasinya pada zaman Meiji, Jepang telah mengkonsep yang kemudian melaksanakan bahwa modernisasi Jepang mengambil model Barat dengan industrinya yang kalah lebih maju sedangkan bahan-bahan bakunya diperoleh dari daerah selatan yang subur dan potensial yang tidak lain adalah Asia Tenggara. Pelaksanaan konsep ini mencapai puncaknya pada awal tahun 1940-an bersama dengan kekacauan internasional sebagai akibat dari kolonialisme dan imperialisme yang saling bersaing. Walaupun pada awal ekspansinya ke selatan Jepang mencapai kemenangan dengan cepat, namun justru berakibat fatal. Jepang kalah dan mengalami kehancuran. Usaha Jepang menguasai selatan, Asia Tenggara yang pada dasarnya usaha mendapatkan sumber-sumber alam bagi pengembangan industrinya mengalami kegagalan. Bahkan berakibat kehancuran total.

Nampaknya, kehancuran Jepang pada perang dunia kedua tidak menghancurkan konsepsi ekspansi ke selatannya. Bila sebelum perang Jepang memaksakan kehendaknya dengan kekerasan dalam ekspansinya ke selatan, setelah perang ekspansi ke selatannya tetap diusahakan dengan cara diplomasi ekonomi.

Melalui perjanjian pampasan perang, Jepang menjalin kembali hubungannya dengan negara-negara Asia Tenggara Perundingan pampasan perang antara Indonesia dengan Jepang dimulai pada akhir tahun 1951. Walaupun akhirnya di capai kesepakatan, perundingan berlangsung lama dan berbelit-belit. Perundingan pampasan perang berakhir pada tanggal 15 April 1958 yang sekaligus terumuskan perjanjian perdamaian serta berlanjut dengan dibukannya hubungan di plomatik kedua negara. Penyebab lamanya perundingan di samping tuntutan Indonesia yang terlalu besar pada pandangan Jepang adalah pertimbangan ketidakstabilan politik Indonesia dan kecenderungan arah politiknya yang nampak lebih dekat dengan negara-negara komunis. Sehingga Jepang bersikap cenderung melihat dan menunggu. Namun, ketika pertimbangan-pertimbangan

kemungkinan dapat memperoleh sumber-sumber alam dan pengembangan pasar hasil industrinya, Jepang mempercepat proses penyelesaian perundingan, di samping tuntutan Indonesia juga turun drastis.

Hubungan Indonesia –Jepang merupakan tipe hubungan yang khas. Sementara Jepang di bawah pengaruh Amerika Serikat yang berarti termasuk blok Barat sedangkan Indonesia dalam perjuangannya berakibat cenderung semakin mendekat kepada negara-negara komunis, mulai ke Uni Soviet kemudian ke China komunis yang berarti blok Timur, dalam suasana perang dingin namun hubungan mereka dapat dikatakan cukup akrab. Baik Jepang maupun Indonesia nampak berhati-hati, menghindari hal-hal yang mungkin menimbulkan ketegangan yang dapat merenggangkan hubungan mereka. Jepang ingin bahwa dana pampasan perang dapat menjadi jalan memperoleh konsepsi-konsepsi barang impor lebih banyak serta mengembangkan pasar bagi hasil industrinya, sementara Indonesia membutuhkan dana pampasan untuk proyek-proyek pembangunan dan juga usaha alih teknologi.

Walaupun Jepang termasuk dalam kubu Barat, nampaknya tidak merasa terlalu terikat dengan tanggung jawab perjuangan ideology melawan blok Timur. Di samping itu Jepang memperoleh payung perlindungan Amerika Serikat. Keadaan ini menjadikan Jepang dengan leluasa memperkuat ekonomi melalui diplomasi ekonomi dan memang jalan itulah satu-satunya bagi Jepang untuk besar kembali. Karena itu, kondisi ideologis manapun yang berkembang di Indonesia tidak akan banyak mempengaruhi usaha Jepang untuk menjaga hubungan akrabnya dengan Indonesia. Walaupun akan lebih menguntungkan bagi Jepang bila Indonesia lebih dekat dengan blok Barat.

Dalam pertikaian Indonesia – Belanda dalam masalah Irian Barat (Sekarang Irian Jaya), sementara Indonesia lebih akrab dengan negara-negara Timur, khususnya Uni Soviet, yang dengan sendirinya berarti renggangnya hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat, Jepang nampak lebih berhati-hati dan menghindari keterlibatannya dalam masalah Irian Barat. Jepang lebih bersikap berusaha menyesuaikan dengan Indonesia walaupun pernah terjadi ketegangan-ketegangan yang disebabkan oleh usaha Belanda untuk menggunakan fasilitas Jepang dalam rangka pertahanan Irian Barat. Sikap Jepang

seperti ini disebabkan oleh kekhawatirannya terhadap kemungkinan ketegangan hubungannya dengan Indonesia yang akan merugikan kepentingan ekonominya. Dalam kasus ini Jepang pernah diancam pemutusan hubungan ekonomi dengan Indonesia.

Sementara Jepang menghindari keterlibatannya dalam masalah Irian Barat, Jepang berusaha melibatkan diri untuk berperan sebagai penengah dalam sengketa Indonesia – Malaysia dengan tujuan utama mencegah sengketa menjadi pertikaian militer terbuka dan berlarut-larut. Pertikaian militer terbuka antara Indonesia dan Malaysia akan sangat merugikan kepentingan ekonomi Jepang. Selat Malaka merupakan garis kehidupan yang mutlak keamanannya bagi Jepang merupakan jalur suplay minyak dari Timur Tengah yang vital.

Ikeda Hayato, Perdana Menteri Jepang pada tahun 1960 sampai 1964, dan Kawashima Shojiro wakil Partai yang berkuasa pada cabinet Sato tahun 1964 sampai 1970, melibatkan diri secara aktif dalam masalah usaha penyelesaian sengketa Indonesia – Malaysia. Bahkan Jepang akan berperan aktif sebagai usaha penengah sengketa tersebut walaupun tidak diminta kedua pihak yang bersengketa. Di samping sengketa yang meluas antara Indonesia – Malaysia akan mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara pada umumnya yang akan mengurangi manfaat dana pampasan perang di kawasan ini, secara khusus dalam hubungannya dengan Indonesia akan merugikan usaha bersama Jepang – Indonesia dalam eksploitasi sumber – sumber alam Indonesia, khususnya minyak di Sumatera Utara.

Usaha Jepang yang nampak antusias dalam menengahi sengketa Indonesia – Malaysia terhenti ketika terjadi usaha perebutan kekuasaan pada bulan September 1965 di Indonesia. Peristiwa itu menggoyahkan kekuasaan Presiden Sukarno dan membuyarkan keseimbangan kekuatan antara PKI dan Tentara yang sekaligus semakin menggeser posisi Presiden dari kedudukn ‘balancer’ kepada polisi yang semakin lemah. Kondisi politik Indonesia dalam keadaan transisi selama beberapa bulan, setidaknya-tidaknya sampai bulan Maret 1966 ketika Presiden Sukarno menandatangani Surat Perintah (sekarang terkenal dengan ‘Super Semar’) yang dikuasakan kepada Letnan Jendral Suharto. Sejak saat itu kekuasaan Presiden Sukarno semakin memudar yang akhirnya hilang sama sekali. Selama

kondisi transisi, Jepang tetap menyatakan dukungannya kepada Presiden Sukarno lah satu-satunya pemimpin kharismatik yang mampu menjaga persatuan bangsa Indonesia yang tingkat heterogenitasnya tinggi, disamping secara formal Presiden Sukarno masih berkuasa. Namun Jepang tidak menyatakan sikap apapun yang bersifat lebih mempertahankan posisi Presiden Sukarno, bahkan menyatakan bahwa Jepang tetap akan tidak mengubah sikapnya dan tetap akan menjaga hubungannya dengan Indonesia walaupun terjadi pergantian pemerintah. Walaupun kenyataan perkembangan politik Indonesia pada saat itu cenderung menguntungkan Jepang namun sikap Jepang tersebut setidak-tidaknya memberikan indikasi kepentingan Jepang terhadap Indonesia, yaitu itu kepentingan ekonominya, khususnya usaha memperoleh sumber-sumber alam. Dan memang itulah kepentingan Jepang yang sesungguhnya dalam berhubungan dengan Indonesia.

Bila dilihat secara keseluruhan hubungan Jepang – Indonesia pada periode 1958-1966 ditambah latar belakang sejarah sejak masa sebelum perang dunia ke dua, nampak bahwa latar belakang yang mendorong Jepang dalam hubungannya dengan Indonesia adalah terutama keinginan Jepang memanfaatkan sumber-sumber alam Indonesia yang pada gilirannya mulai memandang potensi pasar Indonesia barang – barang industrinya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 1978.

Abdulgani, H. Roeslan, “ Ganyang Setiap Bentuk Neo-Kolonialisme yang Mengepung Republik Indonesia” , dalam Indonesia, 1964-B

Asia Pasifik Selayang Pandang, Direktorat Asia Pasifik Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 1969.

Badan Litbang Deplu RI, Jepang sebagai Kekuatan di Asia Badan Litbang Deplu RI, Jakarta, 1981.